

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak dengan tujuan mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian persediaan (Molengraaf, 2010). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setiap perusahaan berusaha mendapatkan laba agar dapat berkembang dan bertahan. Dalam menjalankan usahanya perusahaan akan membuat laporan keuangan secara periodik kepada pihak-pihak berkepentingan agar dapat dinilai kinerjanya. Menurut Gunawan, dkk (2015) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan maupun aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur kinerja serta pertimbangan untuk pengambilan keputusan di waktu mendatang dimana elemen penting yang biasa digunakan dalam menilai suatu perusahaan di laporan keuangannya adalah laba. Menurut PSAK (2018) laba dalam akuntansi adalah laba bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak sedangkan menurut Ardianto (2019) laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*.

Karena laba merupakan cerminan kinerja perusahaan maka manajemen cenderung dapat memanipulasi laporannya dimana menurut Scott (2003), laba dapat dikelola secara efisien yaitu untuk meningkatkan keinformatifan informasi dan dapat bersifat oportunistik yaitu memanipulasi laporan keuangan agar menunjukkan laba yang memuaskan meskipun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Usaha manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan agar nilai laba yang dilaporkan dapat berubah merupakan tindakan dari manajemen laba. Manajemen laba dapat diartikan sebagai campur tangan manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba dengan tujuan tertentu selama dalam batasan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Manajemen laba merupakan sebuah tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan (Guna dan Herawaty, 2010). Sedangkan menurut Azlina (2010) manajemen laba adalah menentukan laba sedemikian rupa dengan mempermainkan pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi baik melalui pemilihan alternative metode maupun melalui operasi. Manajemen laba muncul sebagai dampak dari kebebasan manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu saat merekam dan mengatur informasi pada laporan keuangan (Mappanyukki et al, 2016).

Di sisi lain ada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dimana memerlukan informasi laba dalam menentukan keputusan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut ada hubungan agensi antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manager) sesuai dengan pernyataan Anthony dan Govindarajan (2005) yaitu hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dimana pihak *principal* mendelegasikan wewenang dalam membuat keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan tersebut dijelaskan dalam teori keagenan (*agency theory*) dimana dalam teori ini menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak

antara pihak *principal* dan pihak *agent*, di mana Investor merupakan pihak *principal* sedangkan pihak manajemen pengelola perusahaan merupakan pihak *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak akan berusaha untuk memperoleh kemakmuran yang diinginkan, maka dapat terjadi konflik kepentingan melalui adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham dimana manajer lebih mengetahui mengenai informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibanding pemegang saham. Salah satu contoh kasus terjadinya praktik manajemen laba terjadi PT. Garuda Indonesia, Tbk pada tahun 2019 terkait laporan keuangan tahunan 2018 dimana PT Garuda Indonesia mencatatkan laba sebesar Rp 72,5 miliar dimana hal ini muncul karena adanya kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi tetapi setelah dilakukan penyesuaian pencatatan ternyata PT Garuda Inonesia pada tahun 2018 seharusnya mencatatkan kerugian sebesar Rp 2,53 triliun (CNBC Indonesia, 2021)

Untuk menghindari terjadinya hal seperti itu perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mencapai tujuan perusahaan dan dapat terus bertahan. . Tata kelola perusahaan yang baik dikenal dengan *Good Corporate Governance* dimana menurut Sulistyanto (2008) *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder-nya. Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Mekanisme untuk menerapkan *Good Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melihat dari sisi adanya dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Dewan komisaris adalah wakil para pemegang saham dalam entitas bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tugas melakukan pengawasan, memberikan nasihat atau arahan kepada dewan Direksi terkait perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan bisnis dan isu-isu perusahaan dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan (Dewi et al., 2018). Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sehingga dewan komisaris diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada seluruh pemegang saham melalui RUPS.

Kemudian terkait dengan Komite audit, Menurut Kep.29/PM/2004, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pihak pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam mengatasi masalah terkait pengendalian perusahaan. Menurut Hanggeraeni (2015:81). Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang diperlukan. Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dalam hal ini meliputi serta menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal perusahaan, menelaah sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran BEJ Nomor SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit harus terdiri

dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Mekanisme ketiga yaitu kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi lain yang biasanya diukur dalam persentase jumlah kepemilikan institusional terhadap keseluruhan jumlah saham yang beredar. Menurut Tarjo (2008). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi manajemen perusahaan (*agent*) dimana dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba demi kepentingan pihak tertentu. Hal tersebut dapat terjadi karena institusi pada umumnya akan memantau perusahaan yang diinvestasikan mengenai kinerja dan perkembangannya, dan hal inilah yang dapat menekan adanya manipulasi laba atau kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh manajemen. Menurut Boediono (2005) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen dimana semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan.

Selain faktor *good corporate governance* ada faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba yaitu *leverage*. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya atau dalam mengembangkan usahanya

terkadang mengalami kekurangan dana dan salah satu sumber dana yang dapat diterima yaitu melalui hutang. Rasio *leverage* pada umumnya merupakan pengukuran kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hanafi (2005) menjelaskan bahwa *leverage* keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan apabila menurut Sugiono dan Untung (2008) *leverage* adalah rasio perbandingan antar total utang dengan total aktiva dimana semakin besar hutang perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan untuk membayar kewajibannya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang dimana semakin tinggi rasio *leverage* maka risiko yang dihadapi semakin besar. Dengan kata lain, dengan adanya *leverage* dapat meningkatkan laba perusahaan jika digunakan dengan tepat, akan tetapi jika tidak sesuai yang direncanakan maka dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, atau mungkin lebih besar (Van Horne, 2007). Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh Husna (2015), Mawaddah (2019) dan Ningsih (2019) dimana *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Kemudian ada satu variabel lagi yang akan diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba yaitu profitabilitas karena profitabilitas adalah tolak ukur yang biasanya digunakan oleh investor untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan dalam menentukan keputusan investasinya. Sartono (2010) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva serta modal sendiri. Sedangkan menurut Harahap (2009) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets*

(ROA) sebagai pengukuran untuk rasio profitabilitas karena menurut Hanafi (2005) rasio *Return on Assets* (ROA) ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh Husna (2015), Ningsih (2019), dan Winarti (2019) dimana profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah (2019) yang menggunakan *Good Corporate Governance* dan *Leverage* sebagai variabel independennya untuk diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba. Kemudian penelitian ini juga mengacu pada penelitian Ningsih (2019) yang menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan dan perencanaan pajak sebagai variabel independennya untuk diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba. Berdasarkan acuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan variabel *Good Corporate Governance*, *Leverage* dari penelitian Mawaddah (2019), dan variabel Profitabilitas dari penelitian Ningsih (2019) untuk diuji apa pengaruhnya terhadap manajemen laba.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Alasan digunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar dibandingkan perusahaan sektor dan biasanya memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi karena sebagian besar produk manufaktur tetap dibutuhkan meskipun kondisi berubah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh dari *Good Corporate Governance* dengan mekanisme Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2021. Maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021***”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?
6. Apakah Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Leverage dan Profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

2. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.
5. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.
6. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Leverage dan Profitabilitas secara bersama-sama terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis memperluas informasi dan wawasan mengenai Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas, dan Manajemen Laba.

2. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi manajemen serta memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.